

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah selalu menjadi tugas penting bagi pemerintah. Hal ini mengingat bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peranan yang besar dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang melanda perekonomian Indonesia, salah satunya adalah badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk, perusahaan-perusahaan besar gulung tikar serta beberapa bank di likuidasi. Namun ada beberapa sektor yang masih hidup di tengah gempuran badai krisis ekonomi tersebut, yaitu sektor ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sektor UMKM ini kemudian di anggap sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia di era krisis moneter di mana karena keberadaannya, perekonomian Indonesia masih dapat bergerak. Hal ini dibuktikan pula dengan tumbuhnya ekonomi nasional sebesar 4,8% dalam jangka waktu empat tahun. Jumlah koperasi dan UMKM pada tahun 2000 mencapai 36 juta usaha, dengan dominasi usaha mikro kurang lebih 34 juta, baru di ikuti oleh usaha kecil dan menengah.<sup>1</sup> Pada tahun yang sama, usaha mikro dapat menyerap kurang lebih

---

<sup>1</sup> Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2009), hal. 8.

99,6% tenaga kerja Indonesia , yaitu sekitar 136 juta jiwa. Selanjutnya pada tahun 2004 jumlah UMKM mencapai 44,7 juta unit usaha atau sekitar 99,9% dari seluruh unit usaha di Indonesia. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang mampu dia serap oleh UMKM mencapai 83,6 juta orang.<sup>2</sup>

Pencapaian inilah yang membuktikan bahwa sektor UMKM memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan ekonomi. UMKM merupakan sektor usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, berperan penting dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Beberapa peran penting sektor UMKM lainnya dalam perekonomian Indonesia yakni peranannya sebagai pemain dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Namun, meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian, produktivitas UMKM belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Banyaknya jumlah UMKM di setiap daerah belum di dukung dengan kualitas, sehingga kontribusinya terhadap pengembangan usaha rakyat, penyerapan tenaga kerja, dan perekonomian secara umum kurang optimal dibandingkan dengan usaha besar. Hal ini dikarenakan sektor UMKM masih mengalami hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.

---

<sup>2</sup> Hikmat Kusumaningrat, *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2009), hal. 47 – 48.

Secara umum usaha kecil memang termasuk dalam usaha yang memiliki kelemahan dari beberapa aspek seperti pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi, serta kerja sama yang masih rendah. Karena itulah usaha kecil perlu di berdayakan untuk meningkatkan daya bersaing dan kemandirian usahanya. Dari sinilah konsep pemberdayaan berkembang, di mana terdapat suatu individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah pada beberapa aspek seperti; pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, dan lain-lain. Pemberdayaan masyarakat hakikatnya adalah usaha mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga secara bertahap kualitas dan kesejahteraan hidupnya dapat meningkat.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan cara menumbuhkan iklim dan mengembangkan usaha sehingga tercipta kemandirian. Upaya pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah; dan
2. Pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Undang-undang UMKM (UU RI No. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan tersebut, antara lain; memberikan akses pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan usaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.<sup>4</sup> Dalam hal ini Suharto mengemukakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan dapat didukung oleh adanya pendampingan dari agen pemberdayaan dengan masyarakat atau pelaku usaha sebagai aktor utamanya.

Dalam upaya pemberdayaan ini tentu agen pemberdayaan dan masyarakat sebagai aktor utama harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan UMKM maka aparatur pemerintah sebagai salah satu agen pemberdayaan yang berperan penting adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Secara umum, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki berapa fungsi antara lain;<sup>5</sup>

1. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan dan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;

---

<sup>4</sup> Undang-undang UMKM (UU RI No. 20 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kediri, *Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri*, hal. 5

3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pembinaan UPTD;
5. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
6. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik.

Upaya pemberdayaan UMKM gencar dilakukan di berbagai daerah dengan kebijakannya masing-masing tidak terkecuali di Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri menyampaikan beberapa permasalahan yang masih sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Kediri, yaitu 1) terbatasnya modal usaha, 2) masalah standarisasi produk, 3) masalah perizinan, dan 4) pemasaran.<sup>6</sup> Permasalahan seperti ini biasanya dihadapi oleh pelaku usaha yang masih baru merintis usahanya. Oleh karena itu para pelaku UMK di Kabupaten Kediri perlu mendapat perhatian guna menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri memiliki peran penting dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kabupaten Kediri.

Berdasarkan data jumlah UMKM yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, pada tahun 2018 terdapat 5.141 UMKM yang tersebar di 26 kecamatan dan semakin berkembang menjadi 6.022 per Juni 2019. Sektor UMKM di Kabupaten Kediri ini terdiri dari berbagai cluster usaha seperti; kuliner, fashion, kerajinan, jasa, dan agrobisnis, sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Munfarid (Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan klaster usaha di**  
**Kabupaten Kediri tahun 2018-2019**

No.	Nama Bidang	2018	2019
1.	Kuliner	3.209	3.413
2.	Fashion	182	195
3.	Kerajinan	402	419
4.	Lainnya	1.203	1.584
5.	Jasa	47	72
6.	Agribisnis	98	139
7.	Pedagang Besar	145	200
<b>Jumlah</b>		<b>5.141</b>	<b>6.022</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

Dari tabel dapat diketahui bahwa sektor UMKM di Kabupaten Kediri di dominasi oleh sektor kuliner. Sektor kuliner ini pun bermacam-macam jenisnya, mulai dari makanan, snack, kue basah, kue kering, dan lain sebagainya. Dari beberapa UMKM di bidang kuliner tersebut, terdapat satu usaha yang layak untuk diteliti yaitu usaha keripik gadung Margomulyo yang berada di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. Usaha keripik gadung ini telah berdiri sejak tahun 2012 yang awalnya hanya menjual produk milik tetangga hingga mampu memproduksi sendiri.

Dalam perjalanannya merintis usaha kendala utama yang dihadapi usaha keripik gadung Margomulyo ini adalah dalam pemasaran di mana selama kurang lebih lima tahun penjualan masih dalam daerah saja. Kemudian baru

pada tahun 2017 masuk menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Sejak menjadi usaha binaan, jumlah produksi mengalami peningkatan, penjualan dapat mencapai luar daerah dibandingkan dengan sebelum menjadi binaan.<sup>7</sup>

Hal ini merupakan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri di mana permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah dianalisis untuk kemudian dibentuk strategi dalam menanganinya. Strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam upaya memberdayakan usaha mikro kecil menengah akan dibahas secara mendalam dalam skripsi ini dengan judul Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Kediri yang diimplementasikan pada usaha keripik gadung Margomulyo Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam memberdayakan usaha keripik gadung Margomulyo di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Keripik Gadung Margomulyo Ds. Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri, pada hari Jum'at, 8 Februari 2019

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam memberdayakan usaha keripik gadung Margomulyo di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimanakah hasil yang dicapai dari strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri yang diterapkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam memberdayakan usaha keripik gadung Margomulyo di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam memberdayakan usaha keripik gadung Margomulyo di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri yang diterapkan.

### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan penelitian dalam beberapa hal, antara lain:

1. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam upaya memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil yang ada di



Kabupaten Kediri, terutama pada usaha keripik gadung Margomulyo sebagai salah satu UMKM binaan.

2. Faktor yang mendukung dan faktor menghambat proses pemberdayaan yang dilakukan oleh oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.
3. Hasil yang dicapai dari strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri yang diterapkan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai guna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu para agen pemberdayaan menentukan strategi yang tepat dalam usaha pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Secara praktis

- a. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

- b. Bagi Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Hasil penelitian berupa proposal skripsi ini diharapkan menambah wawasan dan kepustakaan tentunya yang berhubungan dengan strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan maupun pengetahuan tentang bagaimana penerapan strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Definisi Konseptual

- a. Strategi

Andrews mendefinisikan strategi sebagai pola, sasaran, tujuan, dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan.<sup>8</sup>

- b. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap

---

<sup>8</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hal. 1.

usaha mikro kecil menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri”.<sup>9</sup>

c. Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria antara lain, kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta).

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.

Usaha menengah adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

---

<sup>9</sup> Undang-undang UMKM (UU RI No. 20 Tahun 2008), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.

d. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang berwenang di bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

2. Definisi Operasional

Yang dimaksud dengan “Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Kediri” dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri dalam upaya memberdayakan pelaku usaha keripik gadung Margomulyo yang ada di Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

**G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan sangat berperan penting guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini secara sistematis dan menjelaskannya perbagian demi bagian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Tahun 2018. Adapun sistematika penulisannya antara lain:

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.
2. Bagian utama terdiri dari: Bab I pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika skripsi. Bab II landasan teori, terdiri dari (a) konsep strategi pemberdayaan masyarakat, (b) usaha mikro kecil menengah, (c) pemberdayaan usaha mikro kecil menengah, (d) dinas koperasi dan usaha mikro, (e) penelitian terdahulu, dan (f) kerangka konseptual. Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) berisi pendekatan dan jenis penelitian; (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian , (e) analisis data. Bab IV hasil penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis). Bab V pembahasan, berisi pembahasan data penelitian dan hasil analisis data. Bab VI penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran.
3. Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.